

SKRIPSI

**PENGATURAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) AGREEMENT
MENGENAI DUMPING TERKAIT BESI DAN BAJA DAN
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Besi
dan Baja Jenis H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok ke
Indonesia)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

FATIMAH AZZAHRA

2110113026

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL VI



PEMBIMBING

**Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.
Zimtya Zora, S.H. M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 07/PK VI/5/2025

	No. Alumni Universitas	Fatimah Azzahra	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/ 26 September 2002 b. Nama Orangtua : Hendrianto Eka Putri c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Internasional e. No. BP : 2110113026	f. Tanggal Lulus : 11 Juni 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 4 bulan i. IPK : 3,73 j. Alamat : Tanjung Bungo, Situjuah Gadang, Kec. Situjuah Limo Nagari. Kab.50 Kota	

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANITATION (WTO) MENGENAI ANTIDUMPING DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA
(Fatimah Azzahra, 82 halaman, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025)

ABSTRAK

Penjualan dan praktik dumping terhadap produk di pasar Internasional dengan harga di bawah normal atau harga pasar di negara asal merupakan suatu bentuk pelanggaran praktik perdagangan dan dinilai tidak adil atau disebut juga *unfair trade* oleh WTO. Praktik ini juga dapat merugikan dan mengancam industri domestik di negara pengimpor. Belakangan ini di Indonesia dumping menjadi perhatian serius oleh pemerintah mengingat dampak terhadap industri dalam negeri dan keseimbangan ekonomi Nasional. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimanakah pengaturan antidumping berdasarkan WTO dan hukum nasional Indonesia. Kedua, bagaimanakah pelaksanaan aturan antidumping di Indonesia. Metode penelitian didasarkan pada penelitian yuridis yang bersifat normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai antidumping dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) telah diatur secara komprehensif melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 terutama Pasal VI serta diperkuat oleh *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara anggota WTO untuk menerapkan tindakan antidumping apabila terbukti terjadi praktik dumping yang menimbulkan kerugian material bagi industri dalam negeri. Indonesia sebagai anggota WTO telah melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan menyesuaikan hukum nasional melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping. Implementasi teknisnya dilaksanakan melalui beberapa Peraturan Menteri Keuangan, terbaru PMK Nomor 71 Tahun 2024, yang mengatur pengenaan *Bea Masuk Antidumping (BMAD)* terhadap produk-produk yang terbukti melakukan dumping, seperti baja asal Tiongkok.

Kata Kunci: World Trade Organisation, Antidumping, Hukum Perdagangan Internasional

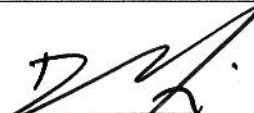
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 5 November 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Magdariza, S.H, M.H	Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Alumni University Number	Fatimah Azzahra	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Bukittinggi/26 th September 2002 b. Parents' Name : Hendrianto Eka Putri c. Faculty : Law d. Concentration : International Law e. Student ID : 2110113026		f. Graduation Date : 5 th November 2025 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 years 4 month i. GPA : 3,73 j. Address : Tanjung Bungo, Situjuah Gadang, Kec. Situjuah Limo Nagari. Kab.50 Kota

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) REGULATION ON ANTIDUMPING AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

(Fatimah Azzahra, 82 pages, International Legal Specialization Program, Faculty of Law, Andalas University, Year 2025)

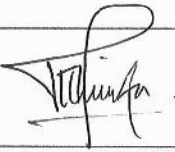
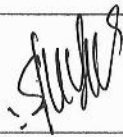
ABSTRACT

The sale and dumping practice of products in the international market at below-normal prices market prices in the country of origin is a form of violation of trade practices and is considered unfair or also called unfair trade by the WTO. This practice can also harm and threaten domestic industry in importing countries. Recently, dumping in Indonesia has been highlighted and has become serious concern by the government considering the impact on the domestic industry and the balance the national economy. The problems that will be discussed in this study are: first, how to regulate antidumping based on the WTO and Indonesian national law. Second, how is the implementation antidumping rules in Indonesia. The research method is based on normative juridical research and the data is analyzed qualitatively. The results of the discussion and research can be concluded that: The study concludes that the regulation on antidumping within the framework of the World Trade Organization (WTO) has been comprehensively regulated through the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, especially Article VI and strengthened by the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement). This provision provides a legal basis for WTO member countries to implement antidumping measures if it is proven that dumping practices have occurred that cause material losses to domestic industries. Indonesia as a member of the WTO has carried out its international obligations by ratifying the Agreement Establishing the World Trade Organization through Law Number 7 of 1994 and adjusting national laws through various regulations, including Law Number 10 of 1995 concerning Customs and Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures. Its technical implementation is carried out through several Regulations of the Minister of Finance, most recently PMK Number 71 of 2024, which regulates the imposition of Antidumping Import Duties (BMAD) on products proven to be dumped such as steel from China.

Keywords: World Trade Organization, Antidumping, International Trade Law

This minor thesis has defended in front of the examiner team at November 5th, 2025.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Magdariza, S.H, M.H	Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of International Law: Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

No. Alumni Faculty	Name:	Faculty/University Officer	Signature:
--------------------	-------	----------------------------	------------